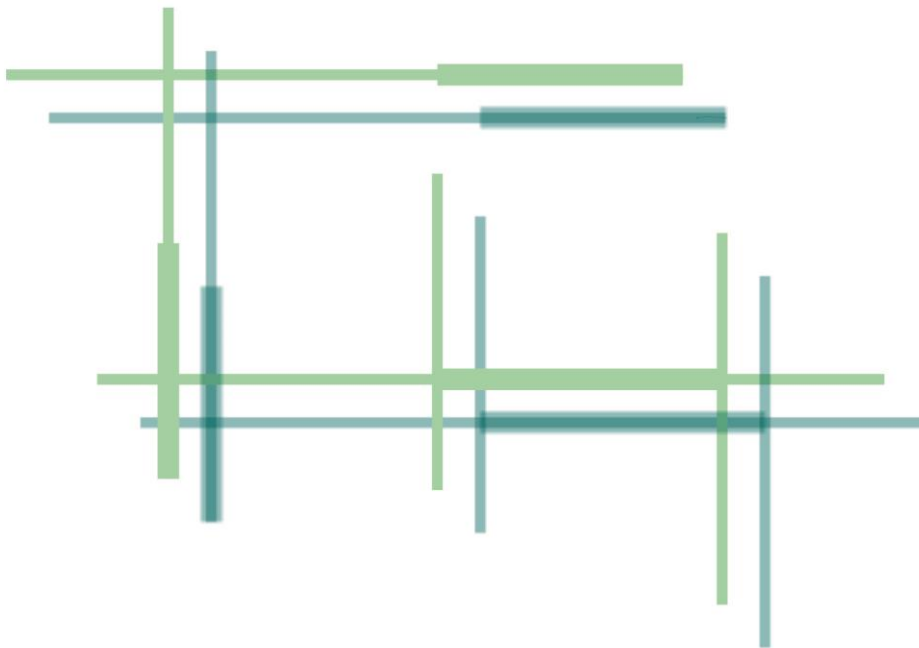




**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERIKANAN**

# **RENCANA KINERJA** **TAHUN 2020**



**Jalan Antasari No.06 Telp / Fax. ( 0567) 21644**  
**PUTUSSIBAU 78711**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan " Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 "dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, serta sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan disusunnya RENJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.



Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini

Putussibau, 2019  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si**  
NIP. 19650129 198603 1 009



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan Nasional, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kapuas Hulu cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha atau 3,27% dari luas perairan umum Indonesia (13,3 juta ha) yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan potensial dengan beragam jenis sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya dimana memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.



RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi/Nasional. Dengan tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat diatasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Propinsi dan Nasional.



Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah sebagai dasar Dinas Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 mengacu Kepada, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan diantaranya sbagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor:25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
4. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No. no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disusun dengan maksud menyediakan acuan dalam menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing SKPD bersipat sinergis dan koordinatif.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun anggaran serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perikanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas





## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasin jumlah program dan jumlah kegiatan.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif
- BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Kesimpulan.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya



**Tabel T- C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD**  
**dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2018**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2 4	<b>Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian</b>										
	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>										
2 4 4	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan										
2 4 4 1	Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perairan budidaya dan perairan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan:									
		a. Hasil perikanan budidaya (ton)	27.853	24.060,20	24.060	25.365,00	105,42	25.263	74.688,20	268,15	
		b. hasil perikanan tangkapan (ton)	41.600	31.550,00	40.050	40.415,00	100,91	41.000	112.965,00	271,55	
		c. Konsumsi Ikan (kg/kapita)	-	37,50	38	38	100,00	-	-	-	



Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

					2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	40	43	40	93,02	46	40,00	80,00	
					<b>PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>									
					1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah pengadaan benih dan pakan	3.85 juta benih dan 250 ton pakan		500.000 benih dan 20 ton pakan	638.000 ekor untuk pakan 43 ton	78,37	700.000 benih dan 50 ton Pakan		
						Jumlah kelompok yang terbina	418 kelompok		150 Kelompok	85 kelompok	176,47	165 kelompok		
					2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan									
					- Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Lokal	Kerjasama yang terjalin dengan Peneliti	9 Kerjasama		3 Kerjasama	3 kerjasama	100,00	3 kerjasama		
					- Peningkatan sarana dan Prasarana BBI Kelansin	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	25 Paket		5 Paket	5 paket	100,00	5 paket		
						Jumlah benih yang dihasilkan	2.750.000 ekor		100.000 ekor	193.968 ekor	193,97	120.000		
						Jumlah PAD dari sektor penjualan benih	1.370.000.000		120.000.000	165.672.500	138,06	130.000.000		
					3. Pertemuan Teknis Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang meningkat Pengetahuannya	200 orang		40 orang	48 orang	120	40 orang		
					4. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR	Peningkatan Produksi benih ikan	500.000 ekor benih		60.000 ekor	130.000 ekor	217	100.000		
					6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan Lingkungan	kegiatan yang di laksanakan	5 kegiatan		1 Keg	1 kegiatan	100	1		
					7. Pembinaan CPIB dan CBIB	Sertifikasi Kelompok Pembudidaya ikan	5 Sertifikasi Kelompok		-	-	-	-		



Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

				8. Pengelolaan Unit Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan Hias Endemik	Ikan Hias Endemik yang dibudidayakan	2 jenis		1 Jenis	1 jenis	100	1 jenis			
				9. Pembinaan Mutu Pakan dan Obat-obatan	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilannya dalam Mutu Pakan dan Obat-obatan	30 kelompok		-	-	-	-			
				<b>PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>										
				1. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	102.625 ton		31.063 ton	31.494 ton	101,38	30.980,00			
				- Pengadaan Pukat Gilnet	Jumlah pengadaan pukat gilnet	3.000 unit		800 unit	1.173 unit	146,62	700 unit			
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	40 Unit		-	-	-	10 unit			
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan BBG	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	20 Unit		-	-	-	8 unit			
				- Pengadaan cool box	Jumlah Pengadaan coolbox	340 Unit		-	-	-	50 unit			
				- Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan	Jumlah balai pertemuan yang dibangun	1 Unit		-	-	-	-			
				2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan										
				- Operasional dan Kegiatan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	7 TPI		7 TPI	7 TPI	100,00	7 TPI			
				- Pembangunan Lanting TPI	Jumlah Lanting TPI	1 Paket		1 paket	0		-			
					Jumlah PAD dari penarikan retribusi TPI			60.000.000	118.667.000	197,78	90.000.000			



				3. Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Tangkap	Tersedianya Dokumen statistik perikanan tangkap	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen			
				4. Pendataan Nelayan	Jumlah nelayan yang terdata	4500 orang		1000 orang			1000 orang			
				5. Pertemuan teknis rukun nelayan	Jumlah Nelayan yang mengikuti pertemuan	200 orang		40 orang	-	-	40 orang			
				<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>										
				1. Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dan penanganan pasca panen	Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan									
				- Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan mutu olahan	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana peningkatan mutu olahan	67 Paket		5 paket	3 paket	60,00	17 paket			
				- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran	Jumlah sarana Pemasaran	16 Paket		1 paket						
				2. Promosi hasil produksi unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi keluar	20 paket		4 paket	2 paket	50,00	4 paket			
					Jumlah pengusaha yang menjalin kerjasama	10 pengusaha		-	-	-	3			
				3. Pengawasan Mutu dan kapasitas produk pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	53 kelompok		10 Kelompok	3 kelompok	30,00	8 kelompok			
				4. Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan										
				- Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	200 kelompok		25 kelompok	10 kelompok	40,00	25 kelompok			



				- Magang studi banding dan pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Jumlah pengolah hasil yang diberangkatkan studi banding dan pelatihan	14 orang		3 orang	2 orang	66,66	-			
				5. Pembinaan kelompok penerima PUMP Pengolah hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	50 kelompok		10 kelompok	-	-	-			
				6. Pertemuan Teknis bagi kelompok pengolah hasil perikanan	jumlah kelompok yang mengikuti	200 kelompok		40 kelompok	-	-	-			
				7. pengukuhan tim FORIKAN	pengurus yang dikukuhkan	4 pengurus		1 pengurus	1 pengurus	100,00	2 pengurus			
				8. Pengawasan Mutu dan Kapasitas Produk Pengolahan Hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil	53 kelompok		10 kelompok	4 kelompok	40,00	-			
				9. Pengembangan statistik dan informasi perikanan pengolahan hasil perikanan	data/ dokumen yang tersedia	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	-			
				<b>Program pengembangan kawasan budidaya air tawar</b>										
				1. Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah KJA dan kolam masyarakat/ percontohan	160 unit		16 unit	25 unit	156,25	34 unit			
				<b>Program pengembangan SDM dan kelembagaan perikanan</b>										
				1. Pembinaan kelompok P2WKSS	Jumlah kelompok yang terbina	5 lokasi Pembinaan		1 lokasi/ tahun	1 lokasi/ tahun	100	1 lokasi/ tahun			
				2. Pekan Daerah	Partisipasi kegiatan	10 orang		2 orang	4	200	2			
				3. Gelar Teknologi	Teknologi tepat guna	5 kegiatan		1 kegiatan	-		1 kegiatan			
				4. Pengembangan Statistik dan informasi kelembagaan kelompok perikanan	Data/ dokumen Kelompok Perikanan	20 Dokumen		-	-	-	-			



				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian sumber daya perikanan</b>									
				1. Pengelolaan sumber daya ikan									
				- cetak buku juknis ikan lokal	jumlah buku	180 buku		80 buku	-	-	-		
				- Co- management berbasis masyarakat	jumlah Desa Percontohan	9 desa		-	-	-	-		
				- Inventarisasi dan pendataan Danau Lindung	dokumen yang tersedia	1 dokumen		-	-	-	-		
				- Panen Ikan di Danau Lindung	kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan		-	-	-	-		
				- Pembangunan prasarana di Danau lindung (lanting dan tenda permanen)	Terbangunnya lanting dan tenda permanen	2 paket		-	-	-	-		
				2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan	Operasional Pengawasan dan pengendalian	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100	-		
				3. Penguatan kelembagaan kelompok pengawas	kemandirian kelompok pengawas	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan		-		
				4. Penanggulangan aktivitas Ilegal Fishing di kabupaten Kapuas Hulu	semakin berkurangnya aktivitas ilegal fishing	80%		40%	40%		-		
				5. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengawasan									
				- Pengadaan Speed Pengawas 40 PK	tersedianya Speedboat	1 unit		-	-	-	-		
				- Pembangunan Pos Pengawasan	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		1,00	-	-	-		
				- Pembangunan Shelter pos Pengawas	Terbangunnya shelter pos pengaswasan	1 unit		1,00	-	-	-		
				- Pos Pengawasan Danau Lindung	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		-	-	-	-		
				- Pendopo Danau Lindung Entibab	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		1,00	-	-	-		





Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

				- Pendopo Danau Lindung Bagut	Terbangunnya Pos Pengawasan	1 unit		-	-	-	-			
				- Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan Perairan Umum Kab. KH.	tersedianya sarana Public Awareness Campaign	1 paket		-	-					
				- Pengadaan Perlengkapan Pokmaswas	tersedianya perlengkapan pengawas	2 unit		-	-					



Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2019 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala teknis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Beberapa kendala dan hambatan serta permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tahun lalu, diantaranya yakni:

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil

- Masih banyaknya Penangkapan ikan yang cenderung tidak ramah lingkungan yaitu menggunakan alat-alat tangkap yang dilarang
- Gejala tangkap yang berlebihan (Over Fishing)
- Kerusakan Sumber Daya Ikan (SDI)
- Masih adanya pelanggaran yang belum tertangani secara tuntas terhadap kejadian di perairan umum
- Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

3. Perikanan Budidaya

- Ketersediaan benih baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung UPR
- Kemampuan SDM Masyarakat pembudidaya masih terbatas
- Terbatasnya akses permodalan
- Minimnya jumlah sarana budidaya (Kolam/Keramba)
- Luasnya wilayah binaan, beratnya medan lokasi budidaya



Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kapuas Hulu secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, yang meliputi :

### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

### **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:



**Tabel T- C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (tahun n-2)	Tahun 2019 (tahun n-1)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2018 (tahun n-2)	Tahun 2019 (tahun n-1)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan			C	B	BB	BB	n/a	n/a	BB	BB	
II	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			-	103	104	105	n/a	n/a	104	105	
III	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)			-	100	101	102	n/a	n/a	101	102	
IV	Nilai Tukar Pengolah Ikan (NTPe)			-	105	106	107	n/a	n/a	106	107	
V	Harga jual ikan segar, beku dan produk olahan ditingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)			2,88	2,88	2,88	2,88	n/a	n/a	2,88	2,88	
VI	Angka pasokan ikan (%)			n/a	3	5	7	n/a	n/a	5	7	



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyusunan perencanaan kinerja serta strategis membutuhkan suatu gambaran tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.



Guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. Isu strategis tingkat OPD:

- 1) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2) Rendahnya pendapatan nelayan tangkap disektor Hulu.
- 3) Rendahnya pendapatan pembudidaya disektor Hulu.
- 4) Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan disektor Hilir (Pengumpul, distributor, Jasa Angkutan/Logistik ikan, Pengolah/Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.

b. Isu strategis tingkat Bidang:

- 1) Rendahnya kontribusi UPR /Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 2) Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 3) Berkurang bahkan menghilangnya beberapa Jenis ikan Endemik Kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomi Tinggi.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk menjaga bahwa Perencanaan pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan, tentunya Dinas Perikanan harus melakukan Review Terhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini;



**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	<b>UMUM</b>				<b>3.532.151.050</b>	<b>UMUM</b>				<b>3.806.224.150</b>	
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%	<b>2.700.031.050</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%		<b>2.686.402.850</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan			5.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan			5.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Perikanan			156.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Perikanan			156.600.000	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perikanan			9.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perikanan			6.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan			121.080.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan			121.080.000	
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan			102.913.600	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan			93.265.400	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perikanan			14.200.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perikanan			8.100.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan			72.940.350	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan			72.940.350	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan			26.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan			26.500.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan			3.625.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan			13.570.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan			290.050.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan			290.050.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dinas Perikanan			13.570.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dinas Perikanan			4.920.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan			19.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan			7.700.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perikanan			120.750.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perikanan			120.750.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perikanan			864.977.600	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perikanan			864.977.600	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dinas Perikanan			217.305.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dinas Perikanan			217.305.000	
	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Perikanan			117.139.500	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Perikanan			117.139.500	
	Penyediaan adminitrasi	Dinas Perikanan			35.000.000	Penyediaan adminitrasi	Dinas Perikanan			24.475.000	
	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Perikanan			16.215.000	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Perikanan			16.215.000	
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Dinas Perikanan			487.565.000	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Dinas Perikanan			487.565.000	
	Penyediaan Jasa Publikasi	Dinas Perikanan			5.000.000	Penyediaan Jasa Publikasi	Dinas Perikanan			31.450.000	
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	<b>223.606.000</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	<b>223.606.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perikanan			56.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perikanan			56.000.000	





Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perikanan			167.606.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perikanan			167.606.000	
	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	<b>79.300.000</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	<b>79.300.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perikanan			79.300.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perikanan			79.300.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4%	<b>70.606.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4%	<b>308.320.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perikanan			70.606.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perikanan			308.320.000	
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Terpenuhinya penyelesaian dokumen- dokumen perencanaan dan keuangan	100%	<b>537.908.000</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Terpenuhinya penyelesaian dokumen- dokumen perencanaan dan keuangan	100%	<b>587.895.300</b>	
			Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	90%				Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	90%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan			6.685.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan			6.635.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perikanan			5.995.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perikanan			12.165.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Dinas Perikanan			3.790.000	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Dinas Perikanan			9.840.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Dinas Perikanan			79.599.000	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Dinas Perikanan			53.935.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Dinas Perikanan			227.944.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Dinas Perikanan			242.666.000	
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Dinas Perikanan			6.620.000	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Dinas Perikanan			5.390.000	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Dinas Perikanan			2.275.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Dinas Perikanan			2.521.000	
	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Dinas Perikanan			205.000.000	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Dinas Perikanan			254.743.300	
	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Perikanan			-	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Perikanan			-	
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>27.840.782.900</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>21.383.702.000</b>	
	<b>Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap</b>		Angka Produksi ikan tangkap meningkat	41.000 Ton	<b>3.510.463.000</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap</b>		Angka Produksi ikan tangkap meningkat	41.000 Ton	<b>3.273.775.000</b>	
	Pemulihan Sumberdaya Ikan				273.275.000	Pemulihan Sumberdaya Ikan				589.850.000	
	Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				1.467.410.000	Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				108.350.000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				392.725.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				324.725.000	



	Perlindungan nelayan Kecil				45.000.000	Perlindungan nelayan Kecil				50.425.000	
	Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				1.332.053.000	Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				2.200.425.000	
	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>		Jumlah Produksi Budidaya	25.263 Ton	<b>9.183.640.500</b>	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>		Jumlah Produksi Budidaya	25.263 Ton	<b>9.183.640.500</b>	
	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				1.755.103.000	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				1.755.103.000	
	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				6.907.567.500	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				6.907.567.500	
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan				263.934.000	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				263.934.000	
	Peningkatan produksi kawasan budidaya minapadi				203.280.000	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				203.280.000	
	Peningkatan pengawasan Peredaran pakan, obat-obatan dan kesehatan lingkungan				53.756.000	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				53.756.000	
	<b>Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya</b>		Produksi UPR		<b>2.626.866.000</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya</b>		Produksi UPR		<b>595.006.000</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				2.195.866.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				595.006.000	
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Produksi dan Pakan Benih Ikan				431.000.000	Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Produksi dan Pakan Benih Ikan				164.420.500	



	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin</b>		Jumlah benih ikan yang diproduksi	429.0000 Ekor	<b>2.853.752.000</b>	<b>Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin</b>		Jumlah benih ikan yang diproduksi	429.0000 Ekor	<b>1.206.722.000</b>	
	Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				688.742.000	Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				670.742.000	
	Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				576.480.000	Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				382.480.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				1.588.530.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				153.500.000	
	<b>Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah</b>		Angka pasokan ikan (%)	2,88	<b>4.713.019.000</b>	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah		Angka pasokan ikan (%)	2,88	<b>5.173.542.000</b>	
	Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				2.200.000.000	Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				688.742.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan TPI				364.477.000	Pengembangan dan Pengelolaan TPI				382.480.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				2.148.542.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				4.102.320.000	
	<b>Penguatan Daya Saing Produk Perikanan</b>		Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah	3 Jenis	<b>2.883.807.400</b>	<b>Penguatan Daya Saing Produk Perikanan</b>		Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah	3 Jenis		
										1.122.111.500	
			Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan	3%				Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan	3%		
	Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				168.046.400	Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				491.720.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)  
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2020

	Promosi Hasil Perikanan				550.000.000	Promosi Hasil Perikanan				192.465.000	
	Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				511.860.500	Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				Rp 215.160.500	
	Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				672.538.000	Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				222.766.000	
	Forikan				451.402.500	Forikan				411.821.500	
	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu				529.960.000	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu				529.960.000	
	<b>Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)</b>		Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik		<b>2.069.235.000</b>	<b>Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)</b>		Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik		<b>828.905.000</b>	
	Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				703.210.000	Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				209.730.000	
	Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				903.425.000	Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				53.425.000	
	Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)				-	Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)				-	
	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				462.600.000	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				565.750.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>31.372.933.950</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>25.189.926.150</b>	



## **2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terus membuka diri terhadap kritik, saran dan masukan dari para stekholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk menuju program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, seperti tersaji dalam Tabel T.C-32.



**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>				
	pembuatan kolam percontohan	dusun hulu tubuk desa nanga tubuk. Kalis		Rp 100.000.000	
	pembuatan kolam percontohan	dusun lubuk mantuk desa tekudak kec. kalis		Rp 100.000.000	
	pembuatan kolam percontohan	PUTUSSIBAU SELATAN, dusun kunsali patamuan desa melapi. putussibau selatan		Rp 150.000.000	
	Pengadaan Kolam Ikan Kelompok Tani,	PUTUSSIBAU SELATAN, Desa Sungai Uluk, Kec.Putussibau selatan		Rp 75.000.000	
	Pengadaan Keramba Ikan	Desa Laut Tawang Kec. Suhaidd		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Laut Tawang Kec. Suhaidd		Rp 200.000.000	
	Pusat Pembuatan Pakan Ikan	Kec. Suhaidd		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Ikan Arwana	Desa Madang Permai Kec. Suhaidd		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Ikan Arwana	Desa Tanjung Kec. Suhaidd		Rp 200.000.000	
	Bantuan Pagar Kolam Kelompok Pembudidaya Ikan Roban Jaya	HULU GURUNG, Dusun Mentawit Barat, Desa Mentawit		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Nila dan Ikan Paten	Kec. Pengkadan		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Kolam Ikan Kelompok Budidaya Uncak Boyan	BOYAN TANJUNG, Desa Nanga Jemah		Rp 200.000.000	
	Pembuatan Kolam Ikan Kelompok Budidaya Sungai Mawang Nanga Taman	HULU GURUNG, Kecamatan Hulu Gurung		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Arwana Poktan Bok Jaya	BUNUT HULU, Desa Temuyuk		Rp 100.000.000	



	Pengadaan Bibit Ikan Arwana Poktan Bina Usaha dan Bina Bersama	BUNUT HULU, Desa Temuyuk		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Arwana Poktan Branyang	BUNUT HULU, Desa Temuyuk		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Arwana	BIKA, Desa Nanga Manday		Rp 100.000.000	
	Bantuan Bibit Ikan Arwana Pemuda OPNAS	BUNUT HULU, Desa Nanga Semangut		Rp 100.000.000	
	Bantuan Bibit Ikan Arwana	BUNUT HULU, Desa Nanga Semangut		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Arwana	BUNUT HULU, Desa Semangut Utara		Rp 100.000.000	
	Bantuan Bibit Ikan Arwana ( PORTY ) Persatuan Pemuda dan Olah Raga Temuyuk	BUNUT HULU, Desa Temuyuk		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Pukat	EMBALOH HILIR, Desa Ujung Bayur		Rp 25.000.000	
	Bantuan Bibit Ikan Arwana	PUTUSSIBAU UTARA, Desa Tanjung Beruang		Rp 100.000.000	





### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang kemudian dituangkan dalam bentuk strategi pembangunan nasional yang kemudian terkait dengan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

#### **Agenda/Nawa Cita ke-6:**

**Sub Agenda:** Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Adapun tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah;
3. Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan.

Sedangkan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik;
2. Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah;



3. Meningkatnya pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan harga terjangkau di tingkat konsumen dan pengolah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Kerja 2020 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Tahun 2020 adalah :

#### **a. Program Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap**

- 1) Pemulihan Sumberdaya Ikan
- 2) Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil
- 3) Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)
- 4) Perlindungan nelayan Kecil
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap

#### **b. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**

- 1) Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya
- 2) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

#### **c. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya**

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR

#### **d. Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin**

- 1) Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin



- 2) Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin

**e. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah**

- 1) Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan TPI
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI

**f. Penguatan Daya Saing Produk Perikanan**

- 1) Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan
- 2) Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)
- 3) Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)
- 4) Promosi Hasil Perikanan

**g. Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)**

- 1) Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah
- 2) Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau
- 3) Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)
- 4) Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Program dan Kegiatan Prioritas tersebut diatas tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil Program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan, Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Indikator capaian Kinerja dan Pendanaan Dinas Perikanan di Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Rencana dinas Perikanan Tahun 2021 tergambar dalam tabel T-C.33 berikut ini



**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Kapuas Hulu**

OPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>UMUM</b>								
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.700.031.050</b>				<b>2.700.031.050</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Kirim untuk 1 Tahun	Dinas Perikanan	30 Surat	5.800.000			30 Surat	5.800.000
		Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun		850 Lembar				850 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pemakaian telpon, Internet, listrik dan air	Dinas Perikanan	12 Bulan	156.600.000			12 Bulan	156.600.000
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pembiayaan ijin surat tanda nomor kendaraan dinas roda 4	Dinas Perikanan	3 STNK	9.000.000			4 STNK	9.000.000



			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pengelola Keuangan Dinas Perikanan yang dianggarkan dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi	Dinas Perikanan	100%	121.080.000			100%	121.080.000
			Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dijaga	Dinas Perikanan	2241 M2	102.913.600			2241 M2	102.913.600
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Pemenuhan Service Peralatan Kerja	Dinas Perikanan	12 Bulan	14.200.000			12 Bulan	14.200.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor untuk 1 Tahun	Dinas Perikanan	15 Lembar	72.940.350			15 Lembar	72.940.350
				Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun		850 Lembar				850 Lembar	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Kartu Ucapan Hari raya, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan penjilidan yang disediakan	Dinas Perikanan	100%	26.500.000			100%	26.500.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor 1 Tahun	Dinas Perikanan	100%	3.625.000			100%	3.625.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	50%	290.050.000			60%	290.050.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah refill tabung gas untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	12 Tabung	13.570.000			12 Tabung	13.570.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Dinas Perikanan	12 Bulan	19.800.000			12 Bulan	19.800.000



				Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya makan minum harian pegawai, tamu dan biaya rapat untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	1 Tahun	120.750.000			1 Tahun	120.750.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	140 OK	864.977.600			140 OK	864.977.600
				Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	153 OK	217.305.000			153 OK	217.305.000
3				Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kontrak yang di tandatangani dan dapat dilaksanakan	Dinas Perikanan	70 SPK	117.139.500			70 SPK	117.139.500
					Jumlah Kegiatan yang di serah terimakan		70 SPK				70 SPK	
				Penyediaan adminitrasi	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi yang disusun tepat waktu	Dinas Perikanan	Dokumen	35.000.000			Dokumen	35.000.000
				Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA serta DPPA Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	3 Dokumen	16.215.000			3 Dokumen	16.215.000
				Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Penyediaan honorarium tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Dinas Perikanan	17 Orang	487.565.000			17 Orang	487.565.000
				Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah iklan/ucapan yang di publikasikan	Dinas Perikanan	10 Iklan	5.000.000				5.000.000
				<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Dinas Perikanan	<b>88%</b>	<b>223.606.000</b>			<b>80%</b>	<b>223.606.000</b>
2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan	Dinas Perikanan	100%	56.000.000			100%	56.000.000



2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan	Dinas Perikanan	100%	167.606.000			100%	167.606.000
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Perikanan	<b>4%</b>	<b>70.606.000</b>			<b>4%</b>	<b>70.606.000</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti/Pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	Dinas Perikanan	8 OK	70.606.000			8 OK	70.606.000
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Terpenuhinya penyelesaian dokumen- dokumen perencanaan dan keuangan	Dinas Perikanan	<b>100%</b>	<b>537.908.000</b>			<b>100%</b>	<b>537.908.000</b>
					Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	Dinas Perikanan	<b>90%</b>				<b>90%</b>	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP Dinas Perikanan yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	6.685.000			1 Dokumen	6.685.000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	5.995.000			1 Dokumen	5.995.000
				Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen keuangan yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	3.790.000			1 Dokumen	3.790.000
				Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Prosentase Aset BMN yang terdata dan dikelola	Dinas Perikanan	100%	79.599.000			100%	79.599.000



			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Dinas Perikanan	6 Dokumen	227.944.000			6 Dokumen	227.944.000
			Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan penetapan Kinerja yang disusun dan tepat waktu	Dinas Perikanan	2 Dokumen	6.620.000			2 Dokumen	6.620.000
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Kegiatan Dinas Perikanan yang disusun dan tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.275.000			1 Dokumen	2.275.000
			Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyajian Data	Dinas Perikanan	1 Dokumen	205.000.000			1 Dokumen	205.000.000
			Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	-	Dinas Perikanan	0	0			0	0
			<b>PERIKANAN</b>								
			<b>Program Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap</b>	Angka Produksi ikan tangkap meningkat	Dinas Perikanan	<b>41.000 Ton</b>	<b>3.510.463.000</b>			41.200 Ton	<b>3.510.463.000</b>
			Pemulihan Sumberdaya Ikan				273.275.000				273.275.000
			Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				1.467.410.000				1.467.410.000
			Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				392.725.000				392.725.000
			Perlindungan nelayan Kecil				45.000.000				45.000.000





				Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				1.332.053.000				1.332.053.000
				<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	Jumlah Produksi Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya	<b>25.263 Ton</b>	<b>9.183.640.500</b>			<b>20.026 Ton</b>	<b>8.662.670.500</b>
				Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				1.755.103.000				1.755.103.000
				Pengembangan Kawasan Budidaya Air				6.907.567.500				6.907.567.500
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan				263.934.000				263.934.000
				Peningkatan produksi kawasan budidaya minapadi				203.280.000				203.280.000
				Peningkatan pengawasan Peredaran pakan, obat-obatan dan kesehatan lingkungan				53.756.000				53.756.000
				<b>Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidayaan</b>	<b>Produksi UPR</b>	Bidang Perikanan Budidaya	<b>100%</b>	<b>2.626.866.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.195.866.000</b>
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				2.195.866.000				2.195.866.000
				Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Produksi dan Pakan Benih Ikan				431.000.000				431.000.000



				<b>Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin</b>	Jumlah benih ikan yang diproduksi	UPT BBI Kelansin	<b>429.0000 Ekor</b>	<b>2.853.752.000</b>				<b>2.853.752.000</b>
				Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				688.742.000				688.742.000
				Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				576.480.000				576.480.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				1.588.530.000				1.588.530.000
				<b>Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah</b>	Angka pasokan ikan (%)		2,88	<b>4.713.019.000</b>			4	<b>4.713.019.000</b>
				Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				2.200.000.000				2.200.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan TPI				364.477.000				364.477.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				2.148.542.000				2.148.542.000
				<b>Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah		3 Jenis	<b>2.883.807.400</b>			4 Jenis	<b>1.902.444.900</b>
					Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan		3%				5%	
				Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				168.046.400				168.046.400
				Promosi Hasil Perikanan				550.000.000				550.000.000



			Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				511.860.500				511.860.500
			Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				672.538.000				672.538.000
			Forikan				451.402.500				451.402.500
			Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu				529.960.000				529.960.000
			<b>Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)</b>	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik			<b>2.069.235.000</b>				<b>2.069.235.000</b>
			Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				703.210.000				703.210.000
			Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				903.425.000				903.425.000
			Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				462.600.000				462.600.000



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program, dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakat pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi yang ada pada Dinas Perikanan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dimuat dalam Tabel 4.1 dibawah ini :



VISI		: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS		
MISI		: MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru</li> <li>5. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif</li> <li>6. Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi</li> <li>7. Menyediakan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai</li> <li>8. Melakukan pengukuran kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkala</li> </ol>
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatnya produksi ikan tangkap	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan potensi/stok ikan tangkap di PUD</li> <li>2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan perikanan</li> <li>5. Meningkatkan produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF</li> <li>6. Menghentikan sementara secara bertahap mengenai cara penangkapan dan budidaya yang tidak lestari, sehingga populasi ikan meningkat</li> </ol>
4	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan pembudidaya</li> <li>3. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya terpadu</li> <li>4. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya berbasis CBF</li> <li>5. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi</li> <li>6. Meningkatnya produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS, BBGR, Pemerintah Desa</li> <li>7. Meningkatkan pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan</li> <li>8. Mengidentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu</li> </ol>



5	Meningkatnya kesejahteraan pengolah	Meningkatnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksana yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha</li> <li>4. Meningkatkan kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha</li> <li>5. Meningkatkan ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengolah</li> <li>6. Meningkatkan mutu produk perikanan</li> </ol>
6	Meningkatkan kontribusi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya	Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan prasarana/sarana produksi benih untuk UPR dan Pokdakan</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan UPR dan Pokdakan dalam produksi benih dan pakan</li> </ol>
7	Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit untuk Masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih	Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan (BI) Kelansin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi bibit dan intensitas inspeksi mutu produksi benih</li> <li>2. Meningkatkan ragam/jenis ikan, pakan yang diuji coba/ produksi, pelayanan diagnosa penyakit/ penjabatan penyakit ikan dan pengamatan kualitas air</li> <li>3. Melaksanakan pembangunan/ pengadaan baru atau peningkatan prasarana/sarana Balai Benih Ikan Kelansin</li> <li>4. Tidak berkurang debit air masuk ke instalasi minimal 3 tahun ini, dan meningkatnya debit air masuk sekurang - kurangnya 3 tahun dari saat ini</li> </ol>
8	Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras sistem logistik ikan di koridor I,II dan III secara bertahap</li> <li>2. Melaksanakan monitoring, evaluasi, investigasi pelaksanaan SLID</li> <li>3. Melaksanakan pelayanan bongkar muat, pelelangan ikan, penarikan retribusi perikanan dan laporan data perikanan yang masuk pelabuhan semakin baik</li> <li>4. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan baik baru atau peningkatan (rehabilitasi) sesuai dengan RUP yang telah ditetapkan</li> </ol>
9	Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD	Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran</li> <li>2. Memfasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama - sama</li> <li>3. Melaksanakan penyusunan draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan</li> <li>4. Meningkatkan peranserta POKMASWAS dan aparaturnya penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan</li> </ol>



Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 100.200.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp 6.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 110.280.000
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 86.876.200
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 4.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 41.017.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.570.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 61.085.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rp 2.520.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.700.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 117.250.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 475.864.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 88.915.000
Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 108.039.500
Penyediaan adminitrasi	Rp 24.690.000
Penyusunan RKA dan DPA	Rp 16.215.000
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 456.185.000
Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 8.250.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 77.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 79.200.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 88.450.000



<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.635.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 12.165.000
Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Rp 9.840.000
Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp 55.810.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Rp 240.096.000
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp 5.390.000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp 2.521.000
Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Rp 123.843.300
Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 76.685.000
<b>Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap</b>	
Pemulihan Sumberdaya Ikan	Rp 73.275.000
Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil	Rp 407.410.000
Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)	Rp 103.295.000
Perlindungan nelayan Kecil	Rp 39.675.000
Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Rp 1.300.053.000
<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	
Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Rp 3.982.718.800
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Rp 1.042.067.200
<b>Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya</b>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR	Rp 164.420.500
<b>Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin</b>	
Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 670.742.000
Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 382.480.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 153.500.000
<b>Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah</b>	
Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	Rp 93.500.000
Pengembangan dan Pengelolaan TPI	Rp 354.827.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Rp 1.721.368.000
<b>Penguatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	
Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan	Rp 112.150.000
Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)	Rp 183.556.000
Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)	Rp 108.107.000
Promosi Hasil Perikanan	Rp 98.657.000





<b>Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)</b>	
Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah	Rp 192.210.000
Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau	Rp 53.425.000
Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)	Rp 58.124.000
Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp 99.900.000
	<b>Rp 13.927.053.400</b>



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perikanan kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 ini disusun dalam rangka menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang mendasar adalah adanya integritas antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam satu keterpaduan gerak langkah operasional pembangunan perikanan guna mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan Umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat bernilai ekonomis tinggi. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum. Dari aspek ekonomi, kawasan Danau Sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya, terutama dari produksi ikan air tawar. Berkaitan dengan hal tersebut Untuk itu, Dinas Perikanan telah berupaya menyusun program perikanan, yang orientasinya tidak saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya tersebut secara bertanggungjawab sehingga dapat menjaga keseimbangan dan kelestariannya.

Mengacu kepada filosofi dari pembangunan itu sendiri, disadari bahwa pembangunan perikanan merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lebih dari itu, merupakan komitmen dan keyakinan kita, bahwa pembangunan perikanan juga



merupakan upaya bersama baik itu Pemerintah, DPRD dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pembangunan perikanan akan lebih berhasil apabila terjadi keterpaduan dan kerjasama seluruh stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perikanan. Tidak saja keterpaduan intra-instansi serta keterpaduan antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga keterpaduan dan dukungan penuh dari pihak lainnya, baik swasta, LSM, maupun masyarakat luas.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2020 ini dapat memberi manfaat dalam pembangunan sektor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik dan berkelanjutan.

Putussibau, 2019  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si**  
NIP. 19650129 198603 1 009